



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IMAM SUJADI**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **237173**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.350.500.000**

1. Tanah Seluas 1580 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1750 m2/500 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 750.500.000
3. Tanah Seluas 1900 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 370.850.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.350.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
5. MOBIL, MITSUBISI EXPANDER MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000



6. MOBIL, HONDA BRIO SATYA MINIBUS Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	56.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	162.578.748
F. HARTA LAINNYA	Rp.	145.000.000
Sub Total	Rp.	3.084.928.748

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.084.928.748

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.